

Dino Patti Jalal: "foreign policy begins at home"

Bendera GAM Kembali Berkibar: Di Antara Bencana dan Bara Lama

fanzine

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA



Derita
Anak
Indonesia
di Bui
Yordania

aktual

TERHANGAT TERPERCAYA

PARTNERSHIP : 0813-1019-7365

Oleh Eka Permana
WIB

**Was-was Antiklimaks Kasus
Nadiem Makarim di Kejaksaan**

**La Tappa
d'ingresso
della
Pubblica
Amministrazione**

Jejak Luka, Suara Bangsa, dan Tanggung Jawab Republik

Edisi ini menghadirkan laporan utama tentang nasib seorang anak Indonesia yang ditahan oleh otoritas Jordania, sebuah kisah yang menggugah nurani sekaligus mempertanyakan keberpihakan negara terhadap warganya di luar negeri. Pada liputan khusus, redaksi menyoroti tangis Aceh dan luka lama yang kembali dikoyak republik akibat lambannya penanganan bencana, yang memicu kegelisahan publik hingga ke jalanan.

Rubrik wawancara menyajikan pengakuan terbuka Kepala BKN mengenai dinamika di balik seragam ASN

dan upaya pembenahan birokrasi yang terus diupayakan. Dari dalam negeri, pembaca akan menemukan laporan tentang tercapainya islah PBNU serta kritik tajam Dino Patti Djalal terhadap Menlu Sugiono.

Rubrik Nusantara mengulas kembali berkibarnya bendera GAM, sementara rubrik internasional menyorot langkah Zionis di tanah Afrika yang memancing emosi global. Di penutup, rubrik Oase mengajak pembaca merenung tentang pentingnya menjaga alam sebagai warisan kehidupan.

Daftar Isi

Laporan Utama

- Anak Indonesia di Jeruji Yordania: Tujuh Bulan Menanti Negara 4
- Hak Anak Jadi Prioritas, Kemlu Terus Kawal Kasus KL di Yordania 10
- Ketika Teror Berpindah ke Layar: Ancaman Sunyi di Ruang Digital Anak Indonesia 12

Laporan Khusus

- Aceh Menunggu Negara: Ketika Krisis Bencana Tak Juga Diangkat Menjadi Nasional 14
- Kenapa Pemerintah Belum Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatra? Pengamat: Padahal Semua Indikator Terpenuhi! 16
- Bencana Sumatera: YLBHI Kritik Pendekatan Militeristik Pemerintah 20

Wawancara

- Menjaga Merit di Tengah Tekanan Politik 22

Nasional

- Islah PBNU Tercapai, Rais Aam dan Gus Yahya Sepakat Muktamar Bersama 24
- Dino Patti Djalal Kritik Kinerja dan Komunikasi Menlu Sugiono 25

Nusantara

- Bendera GAM Kembali Berkibar: Di Antara Bencana dan Bara Lama 26

Dunia Aktual

- Api Baru Israel di Tanduk Afrika 27

Oase

- Alam yang Murka, Manusia yang Lalai 28

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

Direktur Utama: Andy Abdul Hamid **Pemimpin Umum:** Tino Oktaviano **Pimpinan Redaksi:** Rizal Maulana Malik **Redaktur Liputan Khusus:** Eka Permedi, Eroby Jawi Fahmi **Redaktur Fanzine:** Andry Haryanto, Achmat **Redaktur Medsos:** Al Jalil **Redaktur Videografis:** Saiful, Dany Candra Setiadi **Redaktur:** Indra Bonaparte **Reporter:** Rizky Zulkarnain, Sandi Setyawan, Eroby Jawi Fahmi, Achmat, Ricky Setiawan, Muhammad Khamdi (Pantura Pekalongan), Edy Gustan (Lombok) **Kontributor:** Nugroho Sentoso, Halimansyah, Danang Wibowo, Hary Fauzan (Bekasi), Muhammad Aderman (Riau), Ferry Sapto (Batam) **Head Marketing:** Almalludin Sudrajat Muchlica **IT:** Rohadi M Raja **Legal Officer:** DAAR AFKAR & CO. LAWYERS

Alamat Redaksi: Caprof Building Jl. Prof DR Soepomo No. 73B Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan **Telepon** (021) 83706200 **E-mail:** redaksi@Aktual.com iklan@Aktual.com



Laporan
Utama

Anak Indonesia di Jeruji Yordania: Tujuh Bulan Menanti Negara



Sejak 19 Mei 2025, keluarga Rita E. hidup dalam ketidakpastian panjang. Putranya, KL, masih di bawah umur, ditangkap aparat keamanan Yordania di rumahnya di Kota Amman dan ditahan tanpa pendampingan hukum ataupun orang dewasa di tengah pemeriksaan. Tuduhan yang diarahkan terhadapnya adalah keterlibatan dengan kelompok teroris terlarang, sebuah dalih yang menurut keluarganya jauh dari karakter dan perilaku anak yang masih berusia 15 tahun tersebut.

KL dinyatakan menderita gangguan kesehatan mental depresi akut dan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), yang kerap membuatnya impulsif, kurang percaya diri, dan sulit mengendalikan emosi, terutama rasa takut dan sedih.

Kendati demikian, hingga lebih dari tujuh bulan berlalu, ia tetap ditahan dalam proses hukum yang belum memperlihatkan jalur advokasi yang jelas.

Kasus penahanan ini membuka fokus advokasi keluarga terhadap cara negara hadir untuk warganya yang jauh dari tanah air, terlebih ketika yang bersangkutan adalah anak di bawah umur dengan kondisi psikologis yang rentan.

Keluarga menilai kehadiran negara belum dirasakan secara nyata. Permintaan agar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman membesuk KL langsung di tempat penahanan telah disampaikan berulang kali melalui



Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI, tetapi hingga kini belum terealisasi.

“Permohonan itu kami sampaikan agar pihak KBRI bisa melihat langsung kondisi anak tersebut dan memberikan kepastian langsung ke korban, namun hal ini belum ada realisasi hingga saat ini,” kata Ardi Yanto H, perwakilan keluarga.

Keluarga bahkan menyentil sikap pemerintah yang dinilai kurang empatik dalam menangani persoalan ini. Menurut mereka, respons pemerintah terkesan lebih fokus pada urusan administratif dibanding menghadirkan perlindungan konkret terhadap keselamatan anak yang tengah berjuang menghadapi proses hukum asing.

“Mungkin bagi pihak Pemerintah Indonesia terkait, nyawa satu orang tidak terlalu penting,” ujar Ardi secara tegas, merujuk pada upaya yang minim untuk mengadvokasi kasus ini secara intensif.

Selain kunjungan langsung yang belum terwujud, keluarga juga menyoroti bahwa keterlibatan kementerian terkait belum optimal dalam memetakan jalur hukum

prioritas yang bisa mempercepat pemulangan atau pembebasan KL, termasuk opsi-opsi yang tersedia dalam hukum Yordania.

Sementara itu, pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan KBRI menyatakan telah melakukan sejumlah upaya pendampingan sejak keluarga melaporkan penangkapan tersebut.

Rita mengatakan perwakilan Indonesia sempat mengunjungi rumah keluarga dan membantu menyusun laporan, hingga pengiriman nota diplomatik kepada otoritas Yordania.

Meski demikian, menurut Rita, ruang gerak KJRI dan KBRI terbatas oleh prosedur dan kewenangan yang ada, sehingga perkembangan kasus berjalan lambat.

Rita juga menyinggung kondisi psikologis KL yang terus menurun selama masa penahanan. Ia menjelaskan, meskipun KL menerima penanganan medis setelah kondisi memburuk, anaknya tetap berada dalam tekanan mental yang berat dengan kunjungan yang hanya bisa dilakukan dua kali seminggu.

Dalam situasi penuh kelelahan

“Dia sama sekali tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak kekerasan. Kesehatan mental membuat dia impulsif, kurang percaya diri, dan kurang bisa mengontrol emosi sedih dan rasa takut,”

Kepada Yth.
Bapak Presiden Republik Indonesia
Ir. H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Jakarta, Indonesia

Hal: Memohon bantuan untuk proses deportasi anak dibawah umur yang ditangkap di Jordania.

Dengan hormat,

Saya menulis surat terbuka ini agar dapat mendapatkan perhatian lebih dan penanganan cepat atas permasalahan yang kami hadapi.

Saya adalah Warga Negara Indonesia yang sedang bertugas hingga akhir Desember 2025 di Amman, Yordania. Saya memiliki anak yang menderita depresi akut (MMID) dan ADHD yang saat ini berumur 16 tahun, dan hingga kini masih ditahan di Jordania sejak tanggal 19 Mei 2025.

Dengan ini saya yang memohon bantuan kepada Bapak Presiden atas masalah hukum yang menimpa anak kandung saya yang masih di bawah umur yang telah menjadi korban orang-orang tidak bertanggung jawab, membebani kondisi psikologis yang diderita dan trauma yang sudah makin memperburuk kondisinya.

Saya sudah melaporkan kejadian ini ke KBRI Amman dan juga instansi terkait lainnya, termasuk sudah 2 (dua) kali mengirimkan surat ke Kementerian Sekretariat Negara dengan lampiran semua dokumen pendukung. Nomer surat: 258C-G4QMS0, 258X-SHIMN7.

Rincian kejadian:

- Anak saya (KL, tanggal lahir 28 July 2009) ditangkap oleh pihak kepolisian Yordania saat berada di rumah kami pada 19 Mei 2025, di kota Amman.
- Anak saya ditangkap dan ditinterogasi tanpa didampingi kuasa hukum atau pendamping orang dewasa, dan dalam Bahasa Arab yang bukan bahasa utamanya. Walaupun Pihak Kepolisian menghubungi saya untuk datang ke lokasi interogasi, tetapi saya hanya diperbolehkan menunggu dan tidak boleh menggunakan telepon untuk menghubungi pihak mana pun termasuk KBRI. Kemudian saya diharuskan menandatangani semua dokumen dalam bahasa Arab yang tidak saya pahami tanpa penjelasan.
- Anak saya didakwa mencoba bergabung dan berkomunikasi dengan kelompok teroris terlarang. Walaupun demikian, anak saya tidak melakukan tindakan terorisme sama sekali dan hasil interogasi mempunyai banyak kekeliruan karna faktor bahasa. Anak saya dihubungi oleh kelompok teroris ini melalui sosial media (IG) setelah menyukai dan mengikuti akun tersebutlah tersebut. Anak saya berkomunikasi dengan mereka karena tindakan impulsif dan keinginan tabuan, tanpa menyadari tindakan manipulasi yang mereka lakukan untuk anak dibawah umur yang memiliki latar belakang perpisahan orang tua dan kondisi psikologi yang dia derita.
- Sejak minggu pertama tahanan, saya sudah memberikan laporan kondisi kesehatan mental anak saya ke pihak yang berwibaw, tetapi tidak segera ditanggapi oleh pihak

emosional itu, pada 11 Desember 2025, Rita menulis surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berharap suara seorang ibu terdengar oleh kepala negara. Ia memohon agar Presiden dapat mengarahkan dan memberi bantuan kepada kementerian terkait untuk mempercepat advokasi kasus ini, sehingga KL dapat kembali ke Indonesia dan menjalani proses rehabilitasi serta pendidikan seperti anak seusianya.

“Saya memohon bantuan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto

untuk bisa memberi arahan dan bantuan yang diperlukan kepada kementerian terkait guna mempercepat proses penyelesaian masalah anak saya, untuk terus melakukan advokasi secepatnya agar bisa kembali lagi ke Indonesia,” tulis Rita dalam surat permohonannya tersebut.

Rita juga menegaskan bahwa deportasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan langkah krusial demi layanan kesehatan mental yang memadai, rehabilitasi, dan kesempatan bagi anak itu untuk bersekolah serta melakukan aktivitas seperti anak lainnya.

Ia menggambarkan karakter anaknya sebagai sosok yang dikenal baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki kecenderungan melakukan kekerasan.

“Dia sama sekali tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak kekerasan. Kesehatan mental membuat dia impulsif, kurang percaya diri, dan kurang bisa mengontrol emosi sedih dan rasa takut,” tulis Rita.

Rizky Zulkarnaen, Achmat

LINI MASA KASUS KL (MEI-DESEMBER 2025)

19 Mei 2025, Penangkapan

KL ditangkap di rumah pada siang hari saat sedang sendirian.

Ibu dipanggil ke kantor polisi, interogasi berlangsung hingga tengah malam dan KL langsung ditahan.

Ibu tidak diperbolehkan menggunakan telepon, menghubungi KBRI, atau mencari pengacara.

20 Mei 2025, Proses Hukum Dimulai

Ibu menghadiri interogasi lanjutan di pengadilan.

KL dimasukkan ke lembaga detensi untuk anak.

KBRI Amman diberitahu dan akan berkunjung keesokan hari.

21 Mei 2025, KBRI Datang

Staf KBRI mengunjungi rumah keluarga.

Penyusunan laporan penangkapan dan pembahasan pencarian pengacara.

15 Desember 2025, Surat ke Presiden

Rita menulis surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Memohon perhatian dan pertolongan segera atas kondisi anaknya di Yordania.

19 Oktober 2025, Negosiasi Mandek

Negosiasi terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Namun belum ada kepastian hasil diplomasi.

2 Oktober 2025, Tekanan Diplomatik

Surat dikirim ke Kemenlu dan Kedutaan Yordania di Jakarta.

Meminta percepatan penanganan dan permintaan

**23-25
Mei 2025,
Pencarian
Pengacara**

Libur panjang. Keluarga terus mencari pengacara yang berpengalaman dan memiliki reputasi baik.

**26 Mei 2025,
Pengacara
Ditunjuk**

Pertemuan dengan pengacara Mohammad Zada didampingi staf KBRI.

**27-28 Mei
2025,
Dokumen
Kesehatan**

Menyiapkan dokumen kesehatan jiwa dalam Bahasa Arab. Dokumen diserahkan ke pengadilan bersama

**1 Juni 2025,
Permohonan
Bebas
Bersyarat**

Pengacara mengajukan surat permintaan bebas bersyarat pertama. Permohonan ditolak.

**24 Agustus -
7 September 2025,
Upaya di
Indonesia**

Keluarga ke Indonesia untuk bertemu langsung dan mencari respons atas surat permintaan bantuan. Tidak banyak kemajuan.

**16 Juli 2025,
Diplomasi
& BNPT**

Pertemuan dengan staf KBRI membahas langkah diplomatik KBRI dan Kemenlu. BNPT mulai menangani

**20 Juni 2025,
Jalur Advokasi
Nasional**

Keluarga mulai mengirim surat ke berbagai instansi dan kementerian untuk meminta pertolongan.

**15 Juni 2025,
Kondisi
Memburuk**

KL mengalami kejang-kejang dan dilarikan ke Rumah Sakit Jiwa Fuheis. Mulai mendapat pengobatan psikologis intensif.



Hak Anak Jadi Prioritas, Kemlu Terus Kawal Kasus KL di Yordania

Perkara yang menimpa KL, anak warga negara Indonesia (WNI) yang kini menjalani proses hukum di Yordania, terus mendapat perhatian pemerintah. Di Jakarta, Kementerian Luar Negeri (Kemenu) menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus tersebut sejak awal, dengan fokus utama memastikan hak-hak KL sebagai anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung di negara tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemenu, Heni Hamidah, menjelaskan bahwa penanganan perkara KL berada dalam koridor hukum yang berlaku di Yordania, terutama terkait penerapan undang-undang anti-terorisme di negara tersebut.

“Penanganan perkara KL berada dalam mekanisme hukum yang berlaku di Yordania,” ujar Heni saat dihubungi, Rabu (31/12/2025).

Meski demikian, Heni menegaskan bahwa Indonesia tidak tinggal diam. Sejak awal, pemerintah secara konsisten



menyampaikan perhatian kepada otoritas Yordania agar proses hukum yang dijalani KL tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak. Menurutnya, hal itu sejalan dengan komitmen Yordania terhadap berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Hak Anak.

“Kami berharap prinsip perlindungan anak tetap menjadi perhatian,” ujarnya.

Upaya diplomatik pun terus dilakukan. Melalui Perwakilan RI di Yordania, Kemenu telah menjalin koordinasi dan



Foto: facebook.com/IndonesianEmbassyAmman

korespondensi dengan berbagai pihak berwenang setempat. Langkah-langkah tersebut mencakup pengiriman nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Yordania serta Kedutaan Besar Yordania di Jakarta, hingga pertemuan langsung dengan otoritas terkait.

Seluruh upaya itu bertujuan memastikan KL memperoleh akses pendampingan hukum serta perlakuan yang sesuai dengan statusnya sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

“Akses pendampingan hukum terus

kami pastikan,” kata Heni.

Selain menjalin komunikasi dengan otoritas Yordania, Kemenlu juga terus berkoordinasi dengan keluarga KL di Indonesia. Pemerintah melakukan pendekatan lintas kementerian dan lembaga agar aspek perlindungan anak dapat diterapkan secara menyeluruh sepanjang proses hukum berlangsung. Heni menegaskan bahwa negara tidak lepas tangan.

“Kasus ini akan terus kami kawal,” ujarnya.

Achmat



Foto: freepik.com

Ketika Teror Berpindah ke Layar: Ancaman Sunyi di Ruang Digital Anak Indonesia

Wajah terorisme di Indonesia tidak lagi selalu datang dengan bom dan senjata. Ia kini bergerak senyap melalui layar ponsel, menyusup ke ruang privat anak dan remaja.

Kepala BNPT Eddy Hartono menegaskan, meski keamanan

nasional relatif terkendali, ancaman justru bergeser ke dunia digital.

“Ancaman terorisme di ruang digital semakin berkembang, termasuk dengan menyasar kelompok usia anak,” ujar Eddy, Selasa (30/12/2025).

Sepanjang 2025, BNPT menemukan

21.199 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di ruang digital—didominasi propaganda, perekrutan, dan pendanaan.

Lebih mengkhawatirkan, radikalisasi kini berlangsung sangat cepat. Jika sebelumnya memerlukan 2–5 tahun, kini hanya 3–6 bulan melalui media sosial.

Dampaknya nyata. 112 anak di 26 provinsi diperiksa Densus 88 karena terpapar radikalisme digital, mengalami kerentanan psikologis, hingga terlibat fenomena lone actor tanpa pertemuan fisik.



Foto: ANTARA/Andi Firdaus/aa

“Anak-anak yang terpapar menjadi perhatian serius negara,” tegas Eddy, sembari memastikan rehabilitasi, pendampingan psikososial, dan perlindungan hak anak terus diperkuat.

Kelompok Ahli BNPT Reni Kusumowardhani mengungkapkan kelompok teroris kini memanfaatkan gim, video, meme, musik, serta narasi heroisme untuk menjangkau anak dan remaja. Ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan.

Di sisi penegakan hukum, sepanjang 2023–September 2025 aparat berhasil menggagalkan 27 rencana serangan teror, menangkap 230 orang, dan membawa 362 kasus ke persidangan. BNPT juga mencatat 137 pelaku aktif di ruang siber, fenomena self-radicalization, serta 16 kasus pendanaan terorisme senilai Rp5,09 miliar.

Menghadapi ancaman yang terus beradaptasi ini, BNPT memperkuat program pencegahan melalui Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, Desa Siapsiaga, FKPT di 36 provinsi, serta membangun sistem early warning dan early engagement. Perang melawan teror kini berlangsung di ruang digital—dan masa depan generasi muda menjadi taruhannya.

Rizky Zulkarnain dan Eka Permadhy

Aceh Menunggu Negara: Ketika Krisis Bencana Tak Juga Diangkat Menjadi Nasional

Aceh, Provinsi di ujung barat Indonesia yang pernah menjadi simbol solidaritas global pasca-tsunami 2004, kini kembali menghadapi ujian besar. Banjir bandang dan longsor yang dipicu oleh cuaca ekstrem telah melumpuhkan kehidupan masyarakat di banyak kabupaten, merenggut nyawa, serta mengubur rumah dan infrastruktur di bawah lumpur. Namun satu pertanyaan tajam terus disuarakan warga: mengapa pemerintah pusat belum menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional?

Skala kerusakan yang dialami Aceh dan wilayah lain di Sumatra begitu luas. Menurut data Gabungan, bencana ini telah menewaskan lebih dari 1.141 orang (data per 31/12/2025) dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi di tiga provinsi, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pemerintah pusat menegaskan bahwa penanganan berjalan dan sumber daya nasional telah dikerahkan, namun korban yang terisolasi dan keterlambatan bantuan menjadi kenyataan di lapangan.

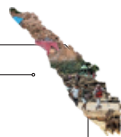
“Banyak orang masih terputus aksesnya. Banjir dan longsor telah

memutus jalan, membuat distribusi bantuan sangat sulit,” kata Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Timur, menggambarkan keterbatasan sumber daya di lapangan.

Ia menekankan bahwa pasokan pangan dan bahan bakar telah menipis dan memohon agar pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan status darurat nasional guna mempercepat respons bantuan.

Respons pemerintah pusat cenderung menolak tekanan itu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, meskipun duka mendalam dirasakan seluruh bangsa, komitmen nasional terhadap penanganan telah dilakukan melalui alokasi sumber daya dan dukungan berbagai kementerian. Namun, kendati bantuan dialirkan, banyak daerah masih kesulitan menjangkau kebutuhan dasar.

Kondisi ini bukan sekadar soal logistik. Di Aceh Tamiang, misalnya, para warga dan relawan harus berjalan melewati batang kayu dan jalan berlumpur untuk sampai ke titik distribusi bantuan karena akses utama putus. Warga bahkan terpaksa mengonsumsi air banjir dan bergantung pada bantuan sukarela



sementara menunggu negara hadir.

Kekecewaan yang mengendap lama akhirnya meletus ke jalan. Di Banda Aceh, Pidie Jaya, dan Lhokseumawe, gelombang protes berkembang menjadi aksi publik yang menuntut pengakuan atas situasi darurat, termasuk melalui pengibaran bendera Bulan Bintang, simbol yang pernah dipakai dalam perlawanan Aceh terhadap arogansi republik.

Demonstran menyatakan simbol itu bukan ajakan separatis, tetapi peringatan bahwa Aceh merasa terabaikan dan hak dasar warga atas keselamatan dan bantuan belum terpenuhi.

Dalam aksi tersebut, seorang demonstran, Nurzahri, juga anggota

Partai Aceh, menyatakan, “Protes ini terjadi karena tidak ada respons dari pemerintah pusat terhadap permintaan kami untuk menetapkan status nasional.”

Ia menggarisbawahi bahwa warga merasa seolah harus mengangkat suara secara luar biasa agar didengar oleh Jakarta.

Respons aparat keamanan pun ikut menjadi sorotan. Dalam beberapa peristiwa, konfrontasi antara demonstran dan personel keamanan menimbulkan kritik dari kelompok HAM.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menilai bahwa pendekatan militeristik terhadap aksi sipil justru menunjukkan ketidakhadiran negara dalam konteks kemanusiaan sekaligus polarisasi yang tidak membantu percepatan bantuan.

Kini di Aceh, sepanjang desa yang sempat terendam hingga ke pusat kota, warga terus menunggu klarifikasi dan keputusan politik yang konkret. Keputusan untuk menetapkan status bencana nasional masih menjadi penentu sejauh mana respons akan dipercepat, bantuan dialirkan lebih cepat, dan kepercayaan publik terhadap negara dipulihkan.

Selama keputusan itu tak kunjung tiba, banyak warga merasa bahwa derita yang mereka alami bukan hanya disebabkan oleh banjir dan longsor, tetapi juga oleh lambannya negara hadir di saat yang paling dibutuhkan.

Eka Permadhy, Eroby Jawi Fahmi, Achmat

KENAPA PEMERINTAH BELUM TETAPKAN DARURAT BENCANA NASIONAL DI SUMATRA? PENGAMAT: PADAHAL SEMUA INDIKATOR TERPENUHI!

Analisis Ekonomi Politik Kusfiardi menyampaikan, Pemerintah pusat mestinya sudah menetapkan status darurat Bencana Nasional di Sumatra. Ia menyebut, bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kini berkembang menjadi krisis kemanusiaan terbesar usai bencana tsunami Aceh 2004 lalu.

Menurutnya, bencana di Sumatra seharusnya sudah memenuhi indikator darurat Bencana Nasional. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan status darurat Bencana Nasional ditetapkan jika korban dalam jumlah besar.

Selain itu, dalam bencana kali ini terjadi kerusakan yang meluas dan lintas-wilayah serta penanganan melebihi kapasitas daerah.



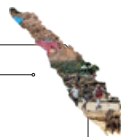
foto: aktual.com

“Semua indikator ini telah terpenuhi secara jelas. Korban meninggal hampir 1.000 jiwa dan terus bertambah. Wilayah terdampak sudah mencakup 53 kabupaten/kota, meliputi setengah wilayah tiga provinsi besar,”

“Semua indikator ini telah terpenuhi secara jelas. Korban meninggal hampir 1.000 jiwa dan terus bertambah. Wilayah terdampak sudah mencakup 53 kabupaten/kota, meliputi setengah wilayah tiga provinsi besar,” ujar Kusfiardi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/12/2025).

Tanpa status darurat Bencana Nasional, kata dia, bantuan internasional tidak bisa masuk dan moratorium utang daerah tidak dapat diterapkan. “Pendanaan APBN sulit digelontorkan cepat. Koordinasi BNPB–TNI–Polri terbatas. Penegakan hukum terhadap deforestasi penyebab banjir melambat,” katanya.

Terlebih, kata Kusfiardi, Menko PMK Pratikno sudah menyatakan bahwa penanganan bencana Sumatra ‘sudah berskala nasional’. “Sebuah pengakuan



tanpa formalitas hukum,” ucap Co-Founder FINE Institute ini.

Terkait argumen Pemerintah pusat bahwa status Bencana Nasional belum diperlukan karena dukungan dan bantuan langsung dari pusat telah berjalan, menurutnya, penanganan bencana saat ini hanya menysar pemukiman.

Sementara, rekonstruksi jembatan, sistem irigasi, rumah sakit, maupun perbaikan logistik nasional memerlukan tanggung jawab Pemerintah pusat.

Kusfiardi pun menduga, penundaan Status Bencana Nasional karena kekhawatiran akan membuka pintu kritik terkait deforestasi oleh korporasi.

“Selain juga munculnya beban fiskal tambahan. Jadi, ada variabel pertimbangan politik dan reputasi pemerintahan baru,” sebutnya.

Namun, katanya, argumen itu tidak sebanding dengan risiko nyawa dan kerusakan jangka panjang yang terus bertambah

Kusfiardi menegaskan, bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar bukan lagi bencana daerah, melainkan bencana nasional yang telah mengganggu

kehidupan jutaan warga, memutus rantai pasok antar-provinsi, dan melampaui kapasitas pemerintah daerah.

“Menetapkan status bencana nasional bukan hanya urusan administrasi. Ini adalah kewajiban moral negara terhadap warganya.

Kewajiban hukum menurut UU 24/2007. Syarat percepatan pemulihan daerah dan pintu bagi bantuan internasional yang sangat dibutuhkan,” ujarnya.

“Paling penting dari semuanya adalah mandat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” sambungnya.

Setiap hari penundaan, tambah Kusfiardi, berarti tambahan korban jiwa dan kerugian lainnya.

“Makin banyak warga jatuh dalam kemiskinan

darurat. Infrastruktur publik makin sulit dipulihkan dan risiko wabah makin besar,” katanya.

Karena itu, ujarnya, sudah saatnya Presiden Prabowo mengambil keputusan bersejarah dengan menetapkan bencana di Sumatra sebagai Bencana Nasional.

“Menetapkan status bencana nasional bukan hanya urusan administrasi. Ini adalah kewajiban moral negara terhadap warganya. Kewajiban hukum menurut UU 24/2007. Syarat percepatan pemulihan daerah dan pintu bagi bantuan internasional yang sangat dibutuhkan,”

Pemerintah Masih Sanggup Tangani

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Pemerintah belum menetapkan status darurat Bencana Nasional terkait bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ia menegaskan status tidak menjadi soal. Yang terpenting adalah proses penanganannya.

“Banyaklah, kan banyak pertimbangan ya. Ada hal-hal yang tidak bisa juga disampaikan ya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut. Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah

“Banyaklah, kan banyak pertimbangan ya. Ada hal-hal yang tidak bisa juga disampaikan ya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut. Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya,”

penanganannya,” kata Pras di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

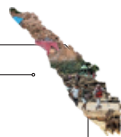
Pras menegaskan Pemerintah telah mengerahkan semua sumber daya dalam menangani bencana di Sumatra. Pemerintah yakin penanganan akan maksimal, sehingga untuk saat ini belum menetapkan status darurat bencana nasional.

“Kemudian support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran yang

Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami, jajaran terkait



Foto: ANTARA/Fahur Rochman/am



untuk mem-back up sepenuhnya proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di tiga provinsi,” ujarnya.

Pras mengatakan tidak ditetapkan status darurat bencana nasional bukan berarti tidak bisa menerima bantuan dari negara lain. Penerimaan bantuan dari luar bisa dilakukan menggunakan inpres seperti pada bencana di Palu beberapa tahun silam.

Ia mengungkapkan saat ini banyak negara sahabat yang sudah menawarkan bantuan. Namun pemerintah belum membutuhkan hal tersebut karena masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan.

“Untuk sementara ini belum ya. Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan, kami mengucapkan terima kasih,” ujarnya.

Empat Teori Chat GPT

Sementara itu, viral di media sosial Instagram seorang konten kreator @yudhaoday menanyakan aplikasi Artificial Intelligence (AI) *Chat GPT* terkait kenapa status darurat Bencana Nasional belum diberlakukan di Sumatra.

Dari konten tersebut, menampilkan empat teori *Chat GPT* kenapa Pemerintah belum menetapkan status

darurat Bencana Nasional di Sumatra.

Teori pertama. Jika bencana di Sumatra ditetapkan sebagai darurat Bencana Nasional, maka izin industri berhenti, begitu pula eksploitasi tambang dan proyek mega-infrasruktur. *Chat GPT* juga menyampaikan, ada pihak yang tidak ingin proyek dan industri milyaran dolar berhenti karena status darurat Bencana Nasional.

Teori kedua. *Chat GPT* menyebutkan, jika status darurat Bencana Nasional ditetapkan maka penyebab kerusakan harus diperiksa, struktur tata ruang dan izin lingkungan harus diaudit, dan siapa yang menyebabkan kerusakan harus diselidiki.

Chat GPT menyatakan, banyak pihak lebih memilih fokus pada status bencana alam dari pada bencana nasional, karena audit akan menungkap terlalu banyak nama yang harus bertanggung jawab.

Teori ketiga. *Chat GPT* menyebut, status darurat Bencana Nasional berefek pada keterlibatan LSM internasional, dan media global. Keterlibatan keduanya menyebabkan transparansi tidak bisa ditutupi, dan tidak ada lagi yang bisa mengatur narasi.

Teori keempat. Status darurat Bencana Nasional berdampak pada rakyat berhak mendapat rumah kembali di tanah yang sama. Namun, dengan status bencana alam, relokasi bisa dilakukan, dan wilayah terdampak bisa digunakan hal lain.

Eroby Jawi Fahmi

BENCANA SUMATERA: YLBHI KRITIK PENDEKATAN MILITERISTIK PEMERINTAH

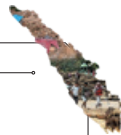


Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik kuat pendekatan militeristik yang dinilai mendominasi penanganan bencana banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera. YLBHI menilai pengerahan aparat bersenjata, termasuk TNI, tidak menyentuh akar persoalan bencana yang bersumber dari kegagalan mitigasi, perencanaan tata ruang, dan perlindungan lingkungan.

Ketua YLBHI, M. Isnur, mengatakan penanganan bencana seharusnya mengedepankan

pendekatan sipil berbasis pengurangan risiko, kesiapsiagaan, serta pemulihan korban. Namun yang terjadi di lapangan justru dominasi pendekatan keamanan melalui pembentukan satuan tugas dan pengerahan aparat militer.

“Pemulihan dilakukan dengan cara militeristik, bukan dengan memperbaiki mitigasi, pencegahan, perencanaan, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini,” ujar Isnur dalam diskusi daring bertajuk Kejahatan Kemanusiaan, Bencana Sumatera/Aceh dan Penyelamatan



Hak Konstitusional Warga Negara, Senin (29/12/2025).

Menurut Isnur, keterlibatan aparat bersenjata dalam fase tanggap darurat memang diatur dalam regulasi kebencanaan. Namun dominasi militer muncul akibat negara gagal menjalankan kewajiban pada tahap pra-bencana. Ia menyoroti pembiaran pembukaan hutan, rusaknya daerah aliran sungai, pengabaian tata ruang, serta tidak ditindaklanjutnya peringatan dini dari BMKG sebagai penyebab utama bencana.

Alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh, pemerintah dinilai justru mengedepankan pendekatan komando. Dampaknya, proses

evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar warga berjalan lambat dan tidak merata, terutama di wilayah terisolasi.

Isnur juga mengkritik sikap pemerintah yang menolak bantuan internasional serta mencurigai laporan relawan dan warga di media sosial. “Menolak bantuan dan mencurigai relawan adalah kesalahan fatal,” tegasnya.

Pendekatan keamanan, lanjut Isnur, berimbas pada penyempitan ruang sipil. Kritik warga kerap dipandang sebagai ancaman. “Bencana ekologis akhirnya bergeser menjadi krisis demokrasi,” katanya.

YLBHI menilai kondisi ini mencerminkan tiga persoalan utama: inkompetensi, sikap anti-sains, dan arogansi kekuasaan. Di tengah keterbatasan negara, masyarakat sipil justru menjadi penopang utama penanganan bencana.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah telah bergerak sejak hari pertama bencana. Ia meminta kritik disampaikan secara bijak dan tidak menggiring opini seolah pemerintah tidak bekerja.

YLBHI menegaskan penanganan bencana harus dikembalikan pada prinsip sipil, berbasis ilmu pengetahuan, dan menjunjung hak asasi manusia agar kesalahan serupa tidak terus berulang.



Foto: Aktual.com/ist

Eka Permadhi

Menjaga Merit di Tengah Tekanan Politik

Pembenahan aparatur sipil negara (ASN) memasuki fase penting di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. Di saat yang sama, ASN juga berada di bawah tekanan politik yang kian terasa, terutama menjelang tahun-tahun politik, ketika birokrasi kerap ditarik ke dalam pusaran kepentingan kekuasaan.

Meritokrasi dan digitalisasi kini menjadi dua pilar utama yang diandalkan untuk menjaga profesionalisme ASN sekaligus melindungi mereka dari intervensi politik. Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja birokrasi, tetapi juga membangun sistem yang adil, transparan, dan tahan terhadap tekanan eksternal.

Kepala BKN Kepala Badan Kepegawaian Negara Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjawab dinamika tersebut dalam wawancara khusus bersama *Aktual.com*.



Publik masih meragukan kualitas ASN dan birokrasi. Apa agenda utama pembenahan yang sedang dijalankan?

Pembenahan difokuskan pada percepatan layanan dan penguatan meritokrasi. Layanan promosi, mutasi, dan demosi ASN kini maksimal lima hari kerja. Banyak tahapan yang tidak penting telah dipangkas dan sebagian layanan sudah berjalan real time berbasis digital.

Seberapa besar peran digitalisasi dalam menopang meritokrasi?

Digitalisasi menjadi tulang punggung meritokrasi. Melalui sistem ASN Digital, seluruh rekam jejak ASN, mulai dari ijazah, pangkat, jabatan, hingga prestasi—tersimpan dan terbaca sistem. Dari 643 instansi pemerintah, 543 lembaga telah menerapkan merit sistem.

Bagaimana sistem ini bekerja dalam proses seleksi jabatan?

Dalam proses terbaru, dari 772 pejabat yang diusulkan, 13 orang langsung ditolak sistem karena tidak memenuhi standar merit. Sistem membaca kinerja dan rekam jejak, sehingga tidak ada ruang bagi promosi yang tidak layak.

Tekanan politik kerap muncul di daerah, terutama menjelang pemilu. Seberapa berat tekanan tersebut dirasakan ASN?

Tekanan itu nyata. Banyak ASN mengalami gratifikasi politik, dijanjikan jabatan jika membantu calon tertentu. Ini menempatkan ASN dalam dilema besar antara menjaga profesionalisme atau tunduk pada tekanan kekuasaan.

Bagaimana sistem melindungi ASN dari tekanan tersebut?

Standar dipasang ketat. Jika tidak memenuhi standar, tidak bisa masuk, sekuat apa pun titipan. Pernah ada calon pejabat yang lolos di daerah, tetapi langsung tertolak di sistem karena nilai kinerjanya tidak memenuhi syarat.

Apakah netralitas ASN menunjukkan perbaikan?

Trennya membaik. Saat ini 153 ASN telah dijatuhi sanksi disiplin terkait pelanggaran netralitas. Masih ada lebih dari seribu perkara yang dalam proses, namun jumlah pelanggaran terus menurun dari tahun ke tahun.

Apa pelajaran terpenting dari dinamika ini?

ASN tidak boleh menjadi korban kontestasi politik. Kepala daerah berganti setiap lima tahun, sementara ASN mengabdikan 30 sampai 40 tahun. Karena itu, sistem merit dan manajemen talenta menjadi kunci untuk melindungi profesionalisme birokrasi.

Rizal Maulanan Malik

Islah PBNU Tercapai, Rais Aam dan Gus Yahya Sepakat Muktamar Bersama



Foto: ist

Islah atau rekonsiliasi antara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) akhirnya tercapai. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan para masyayikh dan mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025).

Secara analitis, kesepakatan ini menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan di tubuh PBNU yang sempat memicu kegelisahan jam'iyah dalam beberapa bulan terakhir. Jalan islah dinilai sebagai solusi paling konstitusional untuk menjaga persatuan Nahdlatul Ulama melalui mekanisme Muktamar.

“Alhamdulillah, hari ini kita

semua menyaksikan peristiwa yang menyejukkan. Islah telah tercapai, dan kami bersama Rais Aam sepakat bahwa jalan terbaik bagi jam'iyah adalah melalui Muktamar bersama,” ujar Gus Yahya dalam siaran pers, Kamis (25/12/2025).

Pertemuan yang berlangsung khidmat tersebut mempertemukan dua pucuk pimpinan PBNU dalam satu forum. Sebagai solusi bersama, kedua belah pihak sepakat menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara bersama-sama.

“Musyawarah di Lirboyo ini merupakan kelanjutan dari Musyawarah Kubro yang digelar di tempat yang sama beberapa hari sebelumnya,” tambahnya.

Para masyayikh menilai konflik internal PBNU yang berawal dari keputusan pemberhentian Ketua Umum dan dinilai tidak sesuai AD/ART NU perlu diselesaikan melalui islah dan Muktamar yang sah.

“Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar,” tegas Gus Yahya.

Sejumlah tokoh sentral NU, termasuk Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin, turut berperan mendorong penyelesaian konflik melalui musyawarah dan persatuan.

Eka Permadhi

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja dan Komunikasi Menlu Sugiono

Mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal menyampaikan kritik terbuka kepada Menlu Sugiono. Pesan itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya @dinopattidjalal.

Dino menyebut pesannya berasal dari pengalaman hampir 40 tahun berkecimpung di dunia diplomasi nasional dan internasional. Ia menegaskan berbicara sebagai seseorang Kemlu, tokoh masyarakat, sekaligus warga negara.

Kritik pertama menyangkut kepemimpinan Menlu dalam mengelola Kementerian Luar Negeri. Menurut Dino, Kemlu membutuhkan kehadiran pemimpin yang fokus dan konsisten.

Ia mengibaratkan Kemenlu seperti mobil mewah performa tinggi.

“Kemenlu itu seperti Ferrari, tapi butuh sopir yang piawai dan fokus,”

ujarnya, dikutip Senin (22/12/2025)

Dino menilai kurangnya arahan membuat kinerja perwakilan RI melemah. Rapat duta besar tertunda dan banyak keputusan strategis minim tindak lanjut.

Kritik kedua diarahkan pada lemahnya komunikasi publik soal politik luar negeri. Dino mengingatkan prinsip “foreign policy begins at home”.

Ia menilai Menlu jarang menyampaikan pidato kebijakan atau wawancara substantif. Menurutnya, komunikasi visual tanpa penjelasan substansi tidak cukup.

Kritik ketiga menyasar hubungan Menlu dengan pemangku kepentingan hubungan internasional. Dino menilai banyak undangan dialog dari komunitas tidak direspons.

Ia menekankan kepercayaan tidak hadir dengan sendirinya.

“*Trust* dan *respect* harus diperjuangkan,” tegas Dino.

Kritik terakhir menyoroti keterbukaan kerja sama dengan akar rumput diplomasi. Dino menilai gotong royong pemerintah dan masyarakat adalah kunci sukses diplomasi Indonesia.

Rizky
Zulkarnain,
Muhammad
Hamidan
Multazam

Foto: aktual.com



Bendera GAM Kembali Berkibar: Di Antara Bencana dan Bara Lama

Di tengah penanganan banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir Desember 2025, pengibaran bendera bulan bintang kembali terjadi di beberapa titik, termasuk Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Aksi ini memantik perhatian publik karena berlangsung ketika ribuan warga masih bergulat dengan dampak bencana dan distribusi bantuan belum sepenuhnya merata.

Negara merespons cepat. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan tidak akan mentoleransi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi darurat untuk kepentingan provokatif.

“Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi dan mengganggu proses penanganan bencana. Kami akan tindak tegas,” ujar Agus.

Pembubaran massa dilakukan aparat TNI dan Polri di Lhokseumawe setelah dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Dalam operasi tersebut, satu orang turut diamankan karena membawa senjata tajam.

Aparat menyatakan fokus utama tetap menjaga stabilitas agar distribusi bantuan dan evakuasi korban tidak terganggu.

Di sisi lain, muncul pandangan dari kalangan legislatif yang melihat peristiwa ini sebagai gejala sosial yang lebih dalam. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan agar negara tidak semata-mata mengedepankan pendekatan represif.

“Ini gejala kekecewaan rakyat. Jangan hanya didekati dengan kekuatan, tetapi juga dengan empati dan dialog,” katanya.

Kecaman juga datang dari berbagai pihak yang menilai pengibaran simbol separatis di tengah kondisi darurat telah mencederai semangat perdamaian

Aceh pasca MoU Helsinki

2005. Pengamat politik dan keamanan Adhie Massardi menilai langkah tersebut berpotensi memperkeruh situasi kemanusiaan.

“Pengibaran simbol konflik lama di tengah

bencana adalah tindakan yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah pusat menegaskan komitmennya mempercepat penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur. “Keselamatan dan kebutuhan warga terdampak adalah prioritas utama pemerintah,” Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy menegaskan.



Foto: aktual.com

Rizky Zulkarnain

Api Baru Israel di Tanduk Afrika



Pengakuan Israel terhadap Somaliland pada 26 Desember 2025 membuka babak baru ketegangan geopolitik di Tanduk Afrika. Israel menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui Somaliland sebagai negara merdeka dan berdaulat, langkah yang mengubah peta diplomatik kawasan setelah tiga dekade wilayah itu memproklamasikan kemerdekaannya dari Somalia tanpa pengakuan internasional luas.

Pemerintah Somalia menanggapi keras. Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud menyebut pengakuan tersebut sebagai “serangan kulit telanjang terhadap kedaulatan kami”, yang tidak akan ditoleransi dan merupakan ancaman serius terhadap persatuan nasional. Bagi Mogadishu, langkah Israel bukan sekadar simbol

politik, melainkan intervensi langsung yang berpotensi memperlemah stabilitas nasional.

Reaksi global pun mengalir deras. Lebih dari 20 negara dari blok Arab,

Afrika, dan organisasi internasional mengecam pengakuan tersebut sebagai “pelanggaran serius terhadap prinsip hukum internasional yang mengancam perdamaian dan keamanan di Tanduk Afrika dan Laut Merah.” Pernyataan bersama itu menegaskan dukungan penuh terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Somalia serta menolak setiap tindakan yang berpotensi memecah belah negara tersebut.

Kritik juga datang dari sejumlah negara bersekutu. Pemerintah Turki menyatakan bahwa pengakuan Israel atas Somaliland merupakan tindakan yang “melanggar hukum internasional dan mencampakkan prinsip keutuhan wilayah Somalia”, serta memperingatkan bahwa keputusan itu justru menghadirkan ketidakstabilan di tingkat regional dan global.

Di tengah kecaman, Israel memandang langkahnya sebagai strategi memperluas pengaruh di kawasan strategis antara Laut Merah dan Teluk Aden, sejalan dengan dinamika pasca-Abraham Accords, namun dinilai banyak pihak berisiko memicu ketegangan geopolitik baru.

Rizky Zulkarnain



Hassan Sheikh Mohamud 
@HassanSMohamud

...

The illegal aggression of PM Netanyahu in recognising a part of Somalia's Northern region is against international law. Meddling with Somalia's internal affairs is contrary to established legal & diplomatic rules. Somalia & its people are one: inseparable by division from a far.

10:12 PM · Dec 27, 2025 · 337.9K Views



Foto: ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/raC

Alam yang Murka, Manusia yang Lalai

Dalam pandangan Islam, alam semesta beserta seluruh ekosistemnya bukanlah entitas netral yang berdiri di luar relasi manusia. Alam adalah ciptaan Allah Swt. yang mengandung tanda-tanda kebesaran-Nya (*āyāt kauniyyah*), sehingga relasi manusia dengan alam bersifat teologis, bukan semata ekonomis. Karena itu, kerusakan alam tidak dapat dipahami hanya sebagai problem teknis atau kebijakan, melainkan juga sebagai persoalan

moral dan spiritual.

Al-Qur'an secara tegas menempatkan manusia sebagai *khalīfah* di bumi. Allah Swt. berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang *khalīfah* di bumi.” (QS. al-Baqarah [2]: 30)



Ayat ini menegaskan bahwa manusia bukan pemilik mutlak bumi, melainkan wakil yang diberi mandat. Kekhalifahan tidak bermakna dominasi tanpa batas, tetapi amanah untuk mengelola, menjaga, dan memastikan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, segala bentuk tindakan yang merusak tatanan alam sejatinya merupakan pengkhianatan terhadap amanah ilahiah tersebut.

Dalam ayat yang sama, para malaikat mempertanyakan potensi manusia yang akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah:

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

Kekhawatiran malaikat ini

mengandung peringatan laten bahwa kecenderungan *fasād* merupakan ancaman nyata dalam sejarah kemanusiaan. Namun Allah menjawab:

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Jawaban ini menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi moral dan spiritual untuk menjaga bumi—namun potensi tersebut hanya terwujud jika amanah kekhalifahan dijalankan secara bertanggung jawab.

Larangan melakukan kerusakan di muka bumi ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. al-A‘rāf [7]: 56)

Kata الفساد (*al-fasād*) dalam ayat ini oleh para ulama tidak dipahami secara sempit. Imam Fakhruddin al-Rāzī dalam *Mafātīh al-Ghayb* menjelaskan bahwa *fasād* mencakup segala bentuk perusakan yang menghilangkan kemaslahatan hidup, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Jika ditarik ke dalam konteks kontemporer, kerusakan lingkungan—seperti penggundulan hutan, pencemaran sungai, eksploitasi tambang berlebihan, dan alih fungsi lahan tanpa kendali—jelas termasuk

kategori *fasād* yang dilarang secara syar‘i.

Al-Qur‘an juga mengaitkan secara langsung antara kerusakan alam dan perbuatan manusia:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia.” (QS. ar-Rūm [30]: 41)

Ayat ini menegaskan bahwa bencana ekologis bukan sekadar fenomena alamiah yang netral secara moral, melainkan memiliki dimensi etis dan teologis. Kerusakan alam adalah cermin dari krisis nilai, keserakahan, dan kegagalan manusia memahami batas perannya di hadapan Allah.

Ibn Kathīr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *fasād* di darat dan laut mencakup rusaknya pertanian, berkurangnya hasil panen, dan hancurnya keberkahan alam akibat kemaksiatan manusia. Bahkan Abū al-‘Āliyah menegaskan:

مَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ

“Barang siapa bermaksiat kepada Allah, maka sungguh ia telah berbuat kerusakan di bumi.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerusakan ekologis dalam Islam

tidak bisa dilepaskan dari kerusakan moral dan spiritual. Ketika manusia memutuskan relasi etisnya dengan Tuhan, dampaknya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural dan ekologis.

Dalam kerangka fiqh ekoteologis, menjaga alam—termasuk hutan, sungai, dan seluruh ekosistem—adalah bagian dari ibadah. Hutan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan penyangga kehidupan (*h. āfiz. al-h. ayāh*): penjaga air, pengendali iklim, dan rumah bagi makhluk Allah lainnya. Merusaknya berarti merusak sistem kehidupan yang telah Allah ciptakan dengan keseimbangan (*mīzān*).

Karena itu, Islam tidak membenarkan eksploitasi alam yang melampaui kebutuhan dan menimbulkan kerusakan jangka panjang. Prinsip *lā d. arar wa lā d. irār* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan saling membahayakan) menjadi dasar etika ekologis yang kuat dalam Islam.

Dengan demikian, krisis lingkungan sejatinya adalah krisis teologis. Ia menuntut pertobatan ekologis (*tawbah bī‘iyah*), perubahan cara pandang, dan penguatan kesalehan ekologis. Manusia hanya akan mampu menjadi khalifah sejati jika ia mampu menjaga bumi sebagai amanah, bukan menjarahnya sebagai penguasa absolut.

Wallāhu a‘lam bi al-ṣawāb.

Rizky Zulkarnain



IKUTI TERUS
DISKUSI PUBLIK BERBAGAI TOPIK TERKINI DAN MENARIK
HANYA DI:

aktual forum

Dialog Publik yang digelar setiap bulan secara hybrid (online dan offline)
di Channel YouTube aktualforum dan Cafe Warung Aceh Garuda (WAG)

Kolaborasi: 813-1019-7365

MEMBEDAH PASAL KRUSIAL DI RUU

YLBHI | **aktual.com** | **aktual forum**

Komjen Pol Oergroseno
(Mantan Wakapoli)

Muhammad Isnur
(Ketua YLBHI)

Ifit
(PhD)

aktualforum | aktual.com | aktual forum
Aktual Forum | aktual.com

KOCOK ULANG KABINET PRABOWO

5 MENIT LAYAK DIREVISI

Nailul Huda
(Direktur Ekonomi Cefor)

Muhammad Hojin
(Program Pusat
Kebijakan (Puspol))

aktual.com | **aktual forum**



Saksikan dan Ikuti Terus
Channel YouTube

aktualforum



Mengupas Berbagai Isu Terhangat dan Menjadi Perhatian Publik

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Partnership/kolaborasi: 081310197365